



**DP3APPKB**

# **LAPORAN KINERJA 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

[www.dp3appkb.surabaya.go.id](http://www.dp3appkb.surabaya.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Selanjutnya, Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Surabaya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka Lkj merupakan bentuk pertanggungjawaban mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan dapat memacu kinerja di masa mendatang untuk lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Surabaya, 12 Februari 2024

**KEPALA DINAS,**  
  
**IDA WIDAYATI MM**  
Pembina Tk. I  
19680908196022002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan total 6 (enam) indikator kinerja, dan 6 (enam) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 6 (enam) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84,24	93,50	110,99%
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	82,91	85,61	103,26%
3	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Indeks Pemberdayaan Gender.	83,46	83,20	99,69%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Mewujudkan keluarga yang berkualitas.	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56,29	62,69	111,37%
5	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk.	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita.	25	8,70	165,20%
		Angka Kelahiran Total (TFR)	1,76	1,70	103,41%

Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 45.391.638.340,- atau 89,83% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.530.174.140,-.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 GAMBARAN UMUM.....	2
I.2.1 Sumber Daya Manusia.....	2
I.2.2 Data Aset .....	4
I.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
I.2.3 Landasan Hukum.....	7
I.2.4 Struktur Organisasi .....	8
I.3 ISU-ISU STRATEGIS .....	10
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	15
II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 .....	24
II.3 PERJANJIAN KINERJA.....	25
II.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
III.1 PENGUKURAN KINERJA 2023 .....	29
III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	30
III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	30
III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak....	33
III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.....	36
III.2.4. Sasaran Strategis 4 : Mewujudkan keluarga yang berkualitas.....	39
III.2.5. Sasaran Strategis 5 : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk .....	41
III.3 CAPAIAN KINERJA LAIN.....	46
III.4 REALISASI ANGGARAN .....	51
BAB IV PENUTUP .....	55
LAMPIRAN.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan .....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan .....	3
Tabel 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatannya .....	3
Tabel 1. 4 Data Aset DP3APPKB.....	4
Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 .....	16
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama .....	24
Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja DP3APPKB Tahun 2023 .....	26
Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 .....	27
Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	29
Tabel 3. 2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” Tahun 2023.....	30
Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak” Tahun 2023.....	33
Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan” Tahun 2023 .....	36
Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Sasaran “Mewujudkan keluarga yang berkualitas” Tahun 2023 .....	39
Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Sasaran “Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk” Tahun 2023.....	41
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	51
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi DP3APPKB .....	9
Gambar 3. 1 Grafik Indikator SAKIP .....	31
Gambar 3. 2 Grafik Indikator Permasalahan Perempuan dan Anak Tanpa Melalui Jalur Hukum .....	34
Gambar 3. 3 Grafik Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan .....	37
Gambar 3. 4 Grafik Indikator Pembangunan Keluarga .....	40
Gambar 3. 5 Grafik Indikator Age Specific Fertility Rate .....	42
Gambar 3. 6 Grafik Indikator Angka Kelahiran Total (TFR).....	45
Gambar 3. 7 Penghargaan Manggala Karya Kencana .....	47
Gambar 3. 8 Penghargaan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting.....	47
Gambar 3. 9 Penghargaan Diamond Award .....	48
Gambar 3. 10 Penghargaan Kelompok KB Pria .....	48
Gambar 3. 11 Penghargaan Praktek Mandiri Bidan .....	49
Gambar 3. 12 Penghargaan PUSPAGA Semanggi Kota Surabaya .....	49
Gambar 3. 13 Penghargaan Kota Layak Anak.....	50
Gambar 3. 14 Anugerah Parahita Ekapraya.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 18 disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini memberikan gambaran utuh terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Laporan Kinerja tersebut juga memaparkan perencanaan strategis sesuai dengan



misi, tujuan, dan sasaran yang diampu, serta pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023. Selain itu dijabarkan juga Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023 beserta seluruh indikator kinerja dan targetnya, hasil capaian kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan strategis pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perencanaan Perangkat Daerah menjadi berkesinambungan.

## **I.2 GAMBARAN UMUM**

### **I.2.1 Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 47 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	4		4
3	Eselon IV	3		3
4	Fungsional (Ketua Tim Kerja)	5	1	4
5	Staff (PNS)	10	2	10
6	CPNS	0	0	0
7	Tenaga Outsorcing	108	61	47
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>		

Tabel 1. 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	18
3	Golongan II	2
4	Golongan I	0
5	Tenaga Outsorcing	108
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>

Tabel 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatannya

No.	Unit Kerja	Status Pegawai			Jumlah per Unit Kerja
		PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	
1	Kepala Dinas	1	0	0	1
2	Sekretariat	7	0	32	39
3	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	3	0	13	16
4	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	0	11	13
5	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	0	20	27
6	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	3		32	35
<b>Jumlah (orang)</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>131</b>

Pada Tahun 2023 Terdapat 1 orang Kepala Dinas, pada Sekretariat didukung personil sejumlah 7 orang PNS dan 32 Tenaga Outsorcing yang terdiri dari 9 orang tenaga keamanan dinas, tenaga IT 1 orang, 6 orang tenaga operasional, 12 orang tenaga administrasi dan sejumlah 4 orang untuk ditempatkan sebagai Satgas Command Center.

Pada bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak didukung 3 orang PNS dan 13 orang tenaga outsourcing yang terdiri dari 10 orang tenaga administrasi dan 3 orang administrasi kegiatan GOW.

Pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak didukung 2 orang PNS dan 11 orang tenaga outsourcing yang ditempatkan di PUSPAGA sebagai konselor sejumlah 2 orang dan 9 orang sebagai tenaga administrasi maupun pendamping.

Pada bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdapat 7 orang PNS, 20 orang outsourcing yang terdiri dari 3 orang ditempatkan sebagai SPG di stand UMKM rumah kreatif Klakah Rejo, Bungurasih dan Balai Kota, 17 orang sebagai tenaga administrasi.

Pada UPTD didukung 3 orang PNS dan 32 orang tenaga outsourcing terdiri dari 14 orang tenaga administrasi, orang satgas outreach, 18 orang shelter atau rumah aman untuk anak.

## I.2.2 Data Aset

Tabel 1. 4 Data Aset DP3APPKB

NO	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN
<b>A</b>	<b>Aset Tidak Bergerak</b>		
	<b>Tanah</b>		
1	Tanah Shelter Perempuan DP5A Jl. Gayungsari Barat XII/GB-15	1	Bidang
2	Tanah Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya	1	Bidang
3	Tanah untuk Rumah Produksi Konveksi/ Fashion, Kerajinan/ Handy Craf-Souvenir & Sablon - Jl. Klakahrejo RT 2 RW 9 Kandangan Benowo	1	Bidang
4	Tanah Bangunan Shelter Laki Laki Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Surabaya	1	Bidang
	<b>Bangunan</b>		
1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya	1	Unit
2	Bangunan Musholla DP5A Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya	1	Unit
3	Bangunan Parkir Kantor DP5A Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya	1	Unit
4	KANTOR UPTD PPA Jl. Nginden Permata No. 1 Surabaya	1	Unit
5	Bangunan Rumah Produksi Konveksi/Fashion, Kerajinan/Handycraft-Souvenir & Sablon (eks. Wisma Bogel) Jl. Klakahrejo RT 02 RW 09 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Permanen	1	Unit
6	BANGUNAN RUMAH DINAS PUSTU SEMOLOWARU/BIDAN Jl. Semolowaru 160 A	1	Unit

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
7	BANGUNAN RUMAH DINAS PUSTU SEMOLOWARU/BIDAN Jl. Semolowaru 160 B	1	Unit
8	Bangunan Shelter (Perempuan) / Rumah Aman Korban Kekerasan Pada Anak Perempuan Jl. Gayungsari Barat XII/GB-15	1	Unit
9	GEDUNG SHELTER ABH (Anak Berhadapan Hukum) /RUMAH TINGGAL (LAKI-LAKI) Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Surabaya	1	Unit
<b>B</b>	<b>Aset Bergerak</b>		
1	Kendaraan Roda 4	10	unit
2	Kendaraan Roda 2	60	unit
<b>C</b>	<b>Aset Peralatan dan Mesin</b>		
1	AC	34	Unit
2	Acces Control Pintu Fingerplus	1	Unit
3	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
4	Almari Buku	1	Unit
5	Almari Hias/ Display	3	Unit
6	BKB KIT	1	Unit
7	Blender	3	Unit
8	Brankas	6	Unit
9	kamera	3	Unit
10	CCTV	18	Unit
11	Compressor	0	Unit
12	Continous Sealer	3	Unit
13	Dispenser Hot and Cool	5	Unit
14	Digital Voice Recorder	2	Unit
15	DVD PLAYER SHELTER	0	Unit
16	DVR HDCVI 4 Channel	2	Unit
17	Filling Besi/Metal	21	Unit
18	Freezer/ Showcase Cooler	3	Unit
19	GENRE KIT (LAPTOP)	30	Unit
20	GENRE KIT (LCD PROJECTOR)	30	Unit
21	GENRE KIT (TAS GENRE KIT)	0	Unit
22	Genset	2	Unit
23	Hand Sealer	1	Unit
24	Handheld Metal Detector (226)	1	Unit
25	Hard Disk	8	Unit
26	HT	2	Unit
27	IMPLANT KIT	26	Unit
28	VTP KIT	4	Unit
29	Induksi Sealer	3	Unit
30	IUD KIT	28	Unit
31	KIE KIT	2	Unit
32	Kipas angin	8	Unit
33	Kompas Gas 2 Tungku	1	Unit

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
34	Komputer	91	Unit
35	Kulkas/Lemari Es Jumbo (1)	1	Unit
36	Kursi pejabat/ Kursi Putar	31	Unit
37	Kursi Tunggu 4 Seat	3	Unit
38	Notebook	11	Unit
39	Layar Infocus	5	Unit
40	LCD Projector	11	Unit
41	Lemari arsip/ lemari besi	34	Unit
42	Lemari Pakaian 2 Pintu	8	Unit
43	Matras	17	Unit
44	Meja Kerja/ Workstasion	85	Unit
45	Meja Lipat	4	Unit
46	Meja Rapat	11	Unit
47	Mesin Absensi Finger Print	1	Unit
48	Mesin Bor	1	Unit
49	Mesin Faximile	2	Unit
50	Mesin Jahit High Speed	4	Unit
51	Mesin Jahit Karung (Covid-19)	2	Unit
52	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
53	Mesin Penghitung Uang	3	Unit
54	Mesin Potong Rumput Gendong	1	Unit
55	Mini Trampolin	1	Unit
56	Mirror Inspection (72)	1	Unit
57	Mobile Rig (63)	1	Unit
58	Monitor Led Uk. 21 Inch	2	Unit
59	Televisi LED	7	Unit
60	Tangga	5	Unit
61	Sterilisator Kering	1	Unit
62	Tandon Air Stainles Stell Profil Tank	1	Unit
63	Oven Tipe Gas	2	Unit
64	Sound system	37	Unit
65	Sofa Kursi Tamu untuk ruang tamu Ka. Badan	1	Unit
66	Scanner	1	Unit
67	Scanner Barcode	2	Unit
68	Printer	44	Unit
69	Rak Besi	36	Unit
70	Pompa Air	6	Unit
71	Pengeras Suara Portable	4	Unit
72	Tensi Meter Non Air Raksa	3	Unit
73	Vacum Cleaner	4	Unit
74	UPS	2	Unit
75	Server	2	Unit
76	White Board Single Face	1	Unit

NO	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN
77	Wireless dan Mic	3	Unit
<b>D</b>	<b>Aset Jalan Jaringan dan Instalasi</b>		
1	Solar Cell (PAKET 8) Lokasi DP3APPKB Surabaya	1	Paket
2	Pipa Air Bersih Dia 160 Dengan Eksisting Paving Stone	1	Paket

### I.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 47 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### I.2.3 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 47 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

#### **I.2.4 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

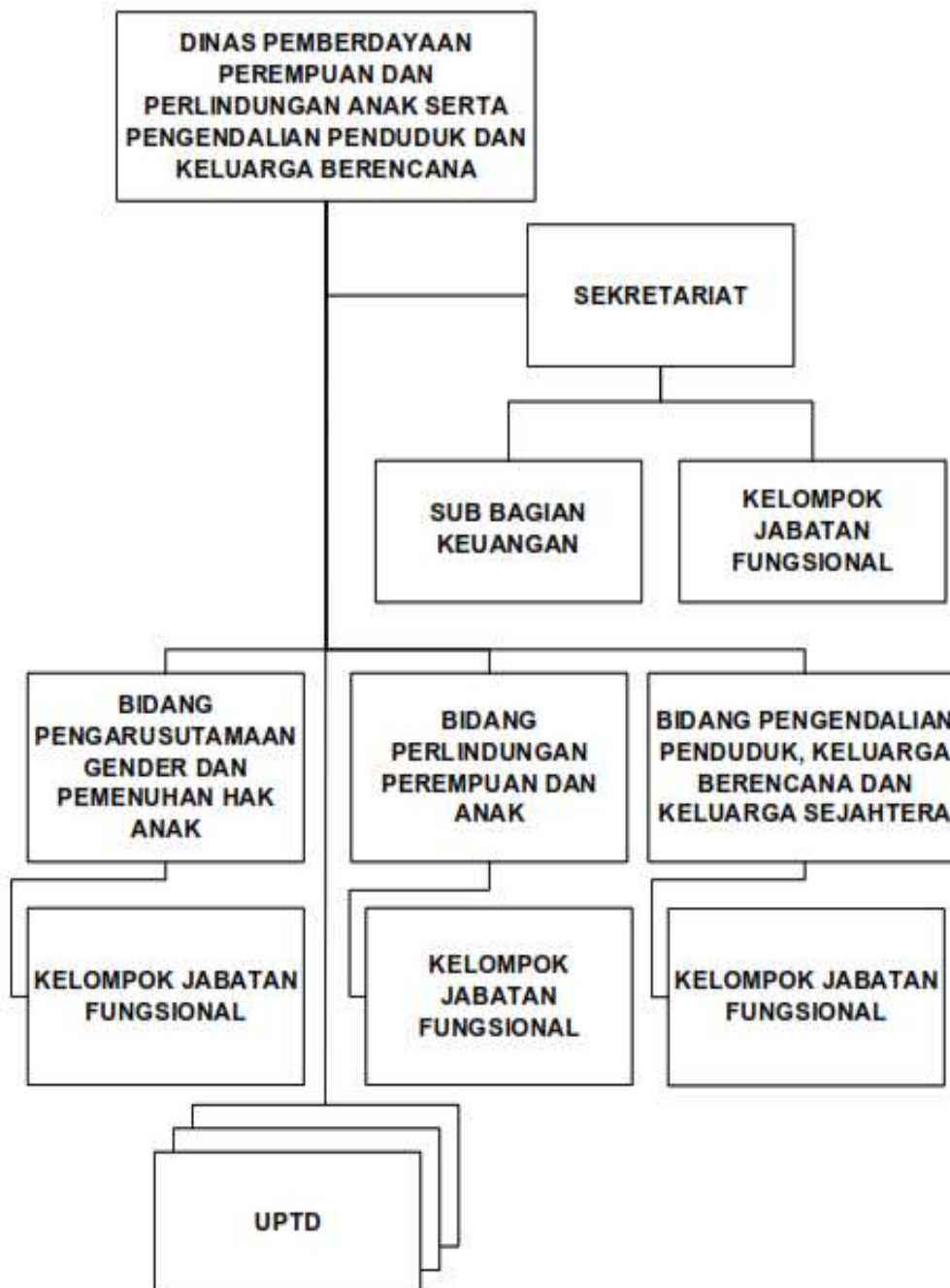
1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5. UPTD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 sebagai berikut.



## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

### DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA



Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi DP3APPKB

### I.3 ISU-ISU STRATEGIS

- 1) Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:
  - a. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
  - b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan *trafficking* (perdagangan orang).
  - c. Salah satu program untuk pencegahan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penjejahteraan keluarga. Upaya preventif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendampingan kelompok tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
  - d. Masih adanya ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat dalam pemenuhan indikator 7 prasyarat pengarusutamaan gender (PUG).
  
- 2) Isu Nasional dan Global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. 17 target sasaran utama:
  1. Tanpa Kemiskinan;
  2. Tanpa Kelaparan;
  3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
  4. Pendidikan berkualitas
  5. Kesetaraan Gender
  6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
  7. Energi Bersih dan Terjangkau
  8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
  9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
  10. Berkurangnya Kesenjangan
  11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
  12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Kelautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
2. Pada tahun 2030, membangun ketahanan keluarga dengan mengoptimalkan penerapan 8 fungsi keluarga yang terintegrasi dengan berbagai sektor.
3. Akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan.
4. Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya.
5. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan maupun perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.
6. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

### 3) Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui analisa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:
  1. Anggaran kegiatan
  2. Sarana dan Prasarana perkantoran

3. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  4. Kewenangan untuk melaksanakan program Program Pengendalian Penduduk
  5. Kewenangan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  6. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
  7. Kewenangan untuk melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga
  8. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
  9. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Perempuan
  10. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  11. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Khusus Anak
  12. Kewenangan untuk melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  13. Dokumen Manajemen Risiko
  14. Proses Bisnis Instansi dan SOP untuk pelaksanaan kegiatan
- b. Kelemahan yang dimiliki terdiri dari:
1. Jumlah dan Kompetensi SDM
  2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
  3. Pemanfaatan data penjangkauan masyarakat

#### 4) Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:
1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
  2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
  3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
  4. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar OPD

- b. Ancaman yang dimiliki antara lain:
1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
  2. Overlapping program dan kegiatan antar OPD
  3. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak
  4. Kondisi pandemi yang tidak bisa diperkirakan selesainya

5) Formulasi Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Formulasi Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023, isu-isu tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking, permasalahan remaja lainnya yang salah satunya dipicu oleh dampak pandemi Covid-19.
  2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
  3. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
  2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need).
  3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
  4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.

## **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2023 ini disusun sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I            PENDAHULUAN
    - A. LATAR BELAKANG
    - B. GAMBARAN UMUM
    - C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
    - D. ISU-ISU STRATEGIS
    - E. LANDASAN HUKUM
    - F. SISTEMATIKA PENULISAN
  - Bab II          PERENCANAAN KINERJA
    - A. PERENCANAAN STRATEGIS
    - B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
    - C. PERJANJIAN KINERJA
  - Bab III        AKUNTABILITAS KINERJA
    - A. CAPAIAN KINERJA
    - B. REALISASI ANGGARAN
  - Bab IV        PENUTUP
- LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2021-2026, memiliki 1 visi yang didukung dengan 5 misi. Dari 5 misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menindaklanjuti misi ke-2, yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya”.

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap Instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah, melalui perencanaan strategis diharapkan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan pembangunan mengacu pada Misi ke-2 Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

**VISI** : Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan  
**MISI** : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya

Mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta upaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya  
**SASARAN** : 1.1 Mewujudkan keluarga yang berkualitas  
1.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk



**TUJUAN** : 2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

**SASARAN** : 2.1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 2.2 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan  
 2.3 Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender	93.74
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84.24
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023
		2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan
<b>Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>			Indeks Pemberdayaan Gender	83.46 %
	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%
	<b>2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen
		2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah
	<b>2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
		2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi
	<b>2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kegiatan
		2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang
	<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023
	<b>2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga
	<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%
	<b>2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Laporan
	2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Laporan
	<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Kelurahan Layak Anak	60.38 %
	<b>2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan
	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	58 Organisasi
	<b>2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan
	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	1 Dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target 2023
			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
			<b>Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak</b>	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	82.91 %
			<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%
				Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	48.38 %
			<b>2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	74 kasus
			2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	74 Orang
			<b>2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	15 kecamatan
			2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	245
			<b>2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan
			2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Layanan

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023
	<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100%
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	48.38 %
	<b>2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	15 kecamatan
		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus
	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan
<b>Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya</b>		Indeks Bangga Kencana	66.96 %
<b>Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk</b>		Angka Kelahiran Total (TFR)	1.76 %
		Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	25
	<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	46.07 %
	<b>2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	150 Orang
	2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI	75 Satuan Pendidikan

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target 2023
			dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	
			<b>2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah
			2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan
			2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan
			2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen
			<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.35 %
				Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	83%
			<b>2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan
			2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi
			2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
			2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan
			2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2023
	<b>2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali
	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	31 Organisasi
	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan
	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang
	<b>2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	307610 Orang
	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
	2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang
	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	66 Unit
	2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
	<b>2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan</b>	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2023
		<b>Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		
		2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen
		2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung
		<b>Mewujudkan keluarga yang berkualitas</b>	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56.29 %
		<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.55 %
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	43.37 %
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	41%
		<b>2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok
			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan
			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan
			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan
		2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	2263 Kelompok

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target 2023
			2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit
			2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	625 Orang
			2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6642 Orang
			2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan

## II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan RPJMD 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	<b>Sasaran:</b> Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.		Penghitungan dilakukan oleh Inspektorat.	DP3APP KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
	Penduduk dan Keluarga Berencana. [600]				
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak. [102]	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	%	(Kasus permasalahan perempuan dan anak - kasus yang berhadapan dengan hukum) / Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak * 100%.	DP3APP KB
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. [103]	Indeks Pemberdayaan Gender.	%	Komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi serta sumbangan pendapatan.	DP3APP KB
4	<b>Sasaran:</b> Mewujudkan keluarga yang berkualitas. [388]	Indeks pembangunan keluarga (ibangga) .	%	Survey keluarga Nilai : <40 = rentan (kurang baik) 40-70 = berkembang (cukup baik) >70 = tangguh (baik).	DP3APP KB
5	<b>Sasaran:</b> Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk. [386]	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita.		Kelahiran per 1000 WUS kelompok umur 15 - 19 tahun (Catatan : Lower is better).	DP3APP KB
		Angka Kelahiran Total (TFR)	%	TFR = $5 \sum ASFR$ (Catatan : Lower is better)	DP3APP KB

### II.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah :

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;

- b. Perubahan dalam strategis yang mmempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran), dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja DP3APPKB Tahun 2023  
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. [600]	1	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84,24	84,24
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak. [102]	2	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	82,91%	82,91%
3	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. [103]	3	Indeks Pemberdayaan Gender.	83,46	83,46
4	Mewujudkan keluarga yang berkualitas. [388]	4	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56,29	56,29
5	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk. [386]	5	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita.	25	25
		6	Angka Kelahiran Total (TFR)	1.76%	1.76%

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

## II.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.163.837.534</b>
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.126.573.642
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.624.284.246
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.979.646
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>1.391.649.735</b>
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	434.697.477
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	335.219.278
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	621.732.980
<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>265.375.211</b>
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.375.211
<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>2.850.624.461</b>
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	600.349.140
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.250.275.321
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>548.104.333</b>
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	166.000.000
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	382.104.333
<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>1.008.880.276</b>
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.008.880.276
<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>1.058.683.811</b>
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.683.811
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.580.717.119</b>
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.580.717.119

Program - Kegiatan		Anggaran (Rp)
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		593.347.000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	179.164.500
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	414.182.500
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		10.052.147.673
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	902.682.800
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	953.824.456
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.706.140.417
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	489.500.000
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		17.016.806.987
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	17.016.806.987
<b>TOTAL</b>		<b>50.530.174.140</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**III.1 PENGUKURAN KINERJA 2023**

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 115,65% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan				REALISASI	CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84,24	0	93,50	93,50	93,50	93,50	110,99%
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	82,91	78,87	81,62	85,33	85,61	85,61	103,26%
3	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Indeks Pemberdayaan Gender.	83,46	0	0	0	83,20	83,20	99,69%



No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan				REALISASI	CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
4	Mewujudkan keluarga yang berkualitas.	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56,29	0	0	0	62,69	62,69	111,37%
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita.	25	0	0	0	8,70	8,70	165,20%
		Angka Kelahiran Total (TFR)	1,76	0	0	0	1,70	1,70	103,41%
<b>Rata-Rata Capaian PD</b>									<b>115,65%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

## III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84,24	93,50	110,99%

### III.2.1.1 Penjelasan Sasaran 1 Indikator 1

- Penjelasan Singkat

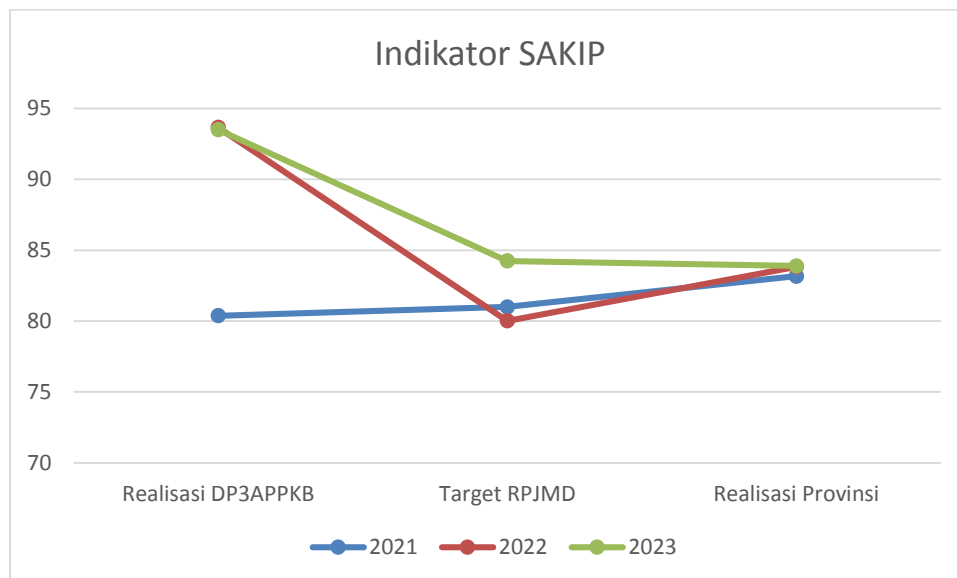
Indikator Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan indikator yang dapat menunjukkan integrasi atau keselarasan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem laporan kerja, dan sistem akuntabilitas keuangan. Perhitungan capaian indikator SAKIP DP3APPKB dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya.

- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target indikator Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2023 yaitu 84,24. Hasil perhitungan Inspektorat Kota Surabaya menunjukkan Nilai SAKIP DP3APPKB yaitu 93,50 sehingga capaian indikator tersebut 110,99%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan target indikator SAKIP DP3APPKB Tahun 2021 yaitu 80, realisasi 80,38 dengan capaian 99,23%. Target tahun 2022 yaitu 84,015, realisasi 93,66 dengan capaian 111,48%.



Gambar 3. 1 Grafik Indikator SAKIP

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Realisasi kinerja pada indikator Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu 93,66.

Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 84,915 Sehingga jika nilai realisasi tahun ini minimal stabil atau bahkan meningkat, maka tidak ada hambatan untuk mencapai target akhir RPJMD 2021-2026

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya  
Realisasi pada indikator SAKIP DP3APPKB tahun 2023 sebesar 93,50, sedangkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi sebesar 83,89. Maka nilai SAKIP DP3APPKB yang berada pada level pemerintah kota lebih besar.
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan DP3APPKB dalam mencapai nilai SAKIP tahun 2023 disebabkan oleh adanya dukungan baik moril maupun materil. DP3APPKB memiliki tiga bidang yang setiap bidangnya turut serta memenuhi kebutuhan data untuk menyusun dokumen-dokumen penilaian SAKIP. Dari segi materil, pelaksanaan operasional perkantoran didukung oleh APBD yang secara efektif dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung kinerja perangkat daerah.

Tidak ada hambatan yang berarti selain terbatasnya jumlah pegawai dengan jabatan analis perencanaan, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi DP3APPKB dalam memperoleh nilai SAKIP dengan kategori AA.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Dalam penilaian Indikator SAKIP DP3APPKB, telah dilakukan efisiensi sumber daya seperti optimalisasi dan sinergi yang diterapkan pada kinerja pegawai dalam penyusunan dokumen penilaian SAKIP.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Penilaian SAKIP menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Sekretariat. Dengan memaksimalkan penyusunan dokumen-dokumen penilaian SAKIP. Maka program yang mendukung keberhasilan indikator SAKIP yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan memiliki tiga kegiatan yaitu:

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya  
Indikator SAKIP DP3APPKB tahun 2023 memiliki nilai sebesar 93,50 dengan kategori AA yang artinya secara kategori telah maksimal. Namun nilai masih dapat dimaksimalkan

dengan melaksanakan rencana tindak lanjut berupa perbaikan dokumen pendukung penilaian SAKIP melalui reviu yang telah diberikan oleh Inspektorat.

### III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	82,91	85,61	103,26%

#### III.2.2.1 Penjelasan Sasaran 2 Indikator 1

- Penjelasan Singkat

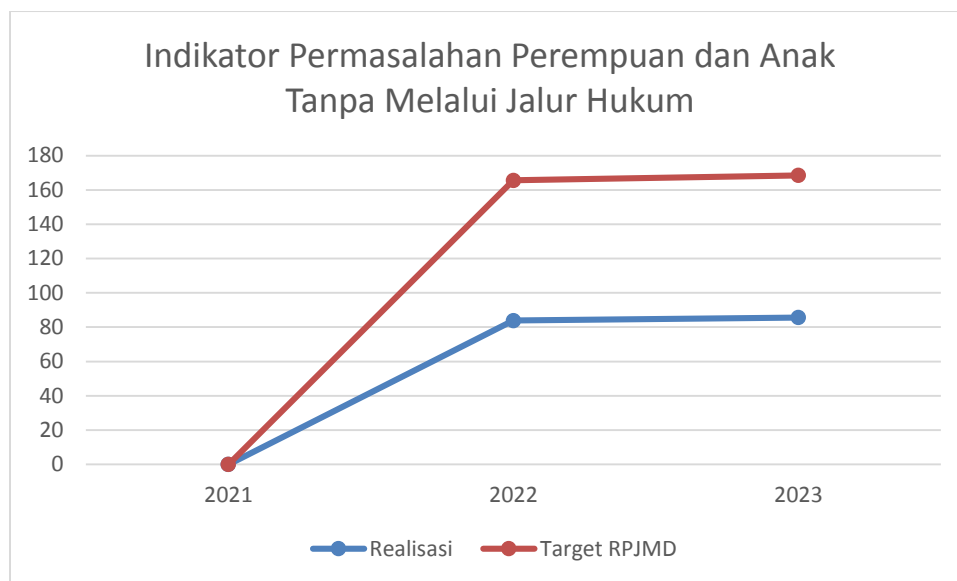
Indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum memiliki formulasi perhitungan (kasus permasalahan perempuan dan anak - kasus yang berhadapan dengan hukum) / Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak \* 100%. Definisi penyelesaian permasalahan tanpa melalui jalur hukum: proses penyelesaian tanpa masuk ke ranah hukum /tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum di tahun 2023 yaitu 82,91%. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 85,61% sehingga capaian indikator tersebut 103,26%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2021 tidak ada indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum namun terdapat indikator Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani dengan capaian 100%. Target tahun 2022 yaitu 81,78, realisasi 83,85 dengan capaian 102,53%.



Gambar 3. 2 Grafik Indikator Permasalahan Perempuan dan Anak Tanpa Melalui Jalur Hukum

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra  
Realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum tahun 2023 yaitu 85,61%. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 85,88%. Maka masih terdapat selisih 0,27% sehingga kinerja DP3APPKB pada indikator tersebut perlu ditingkatkan sampai dengan tahun 2026.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya  
Realisasi pada indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum tahun 2023 sebesar 85,61, sedangkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terdapat indikator yang sama mengingat penyelesaian permasalahan perempuan dan anak atau penanganan kasus dilakukan pada level pemerintah kota.
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
Keberhasilan DP3APPKB dalam menangani permasalahan perempuan dan anak tahun 2023 disebabkan oleh adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berdiri sejak tahun 2023 dengan tugas dan fungsi yang berfokus pada penanganan permasalahan perempuan dan anak. Adanya UPTD PPA mempermudah kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penanganan awal sampai dengan pemberian intervensi karena telah memiliki payung hukum atau kebijakan yang jelas. Selain itu, sarana dan

prasarana mulai dari gedung, kendaraan operasional, dan lain sebagainya menunjang percepatan penanganan permasalahan perempuan dan anak yang selesai tanpa melalui jalur hukum.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam penilaian Indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum, telah dilakukan efisiensi sumber daya seperti optimalisasi penggunaan air dan listrik pada gedung UPTD PPA dan BBM pada kendaraan operasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD PPA memiliki Satgas PPA dan hotline yang beroperasi selama 24 jam dan atau 7 hari dalam seminggu, maka efisiensi sumber daya selalu diterapkan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan memaksimalkan kebijakan yang ada di Bidang PPA dengan pelaksanaan teknis yang dilakukan UPTD PPA. Maka program yang mendukung keberhasilan indikator persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum yaitu Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan yaitu 1) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dan 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga terdapat Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya

Indikator Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum Tahun 2023 memiliki nilai sebesar 85,61% dari target 82,91%. Meski target telah tercapai namun DP3APPKB tetap melakukan upaya peningkatan kinerja melalui pembuatan shelter perempuan dewasa yang akan menjadi sarana penunjang bagi UPTD PPA dalam memberikan intervensi pada korban sehingga diharapkan dapat menekan angka permasalahan yang terselesaikan menggunakan jalur hukum.

### III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender.	83,46	83,20	99,69%

#### III.2.3.1 Penjelasan Sasaran 3 Indikator 1

- Penjelasan Singkat

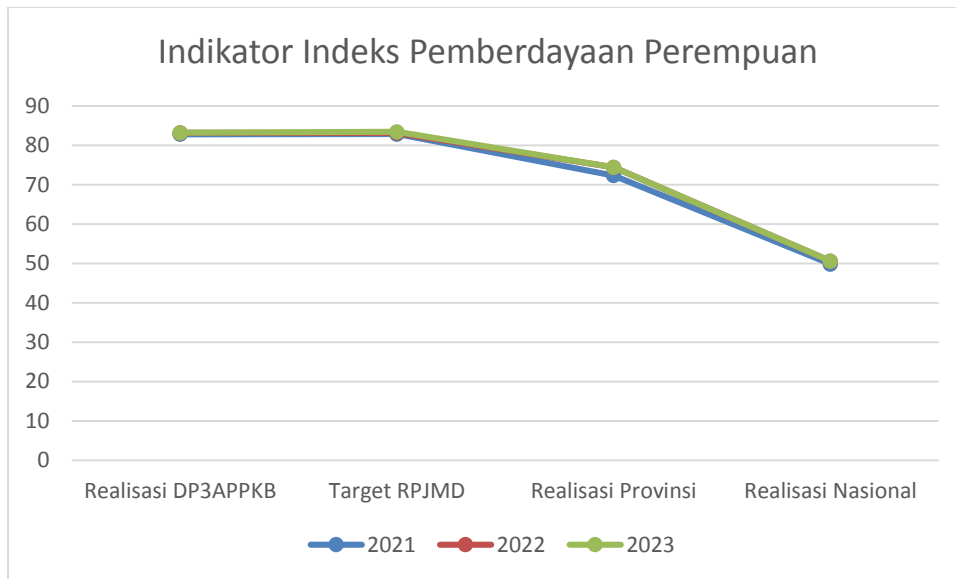
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks pencapaian yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Formulasi perhitungan IDG yaitu Komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi serta sumbangan pendapatan yang dihitung oleh BPS.

- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target indikator Indeks Pemberdayaan Gender di tahun 2023 yaitu 83,46. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 83,20 sehingga capaian indikator tersebut 99,69%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2021 indikator Indeks Pemberdayaan Gender memiliki target 82,86 dan realisasi 82,82 dengan capaian 99,95%. Target tahun 2022 yaitu 83,16 dan realisasi 83,20 dengan capaian 100,05%. Target tahun 2023 yaitu 83,46 dan realisasi 83,20 dengan capaian 99,69%. Realisasi 2023 sama dengan 2022 karena masih menggunakan perhitungan terakhir yang dikeluarkan oleh BPS.



Gambar 3. 3 Grafik Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra  
Realisasi kinerja pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 yaitu 83,20. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 84,36. Maka masih terdapat selisih 1,16 sehingga kinerja DP3APPKB pada indikator tersebut perlu ditingkatkan sampai dengan tahun 2026.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya  
Realisasi pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 sebesar 83,20, sedangkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi 74,42 dan level nasional memiliki realisasi 50,58.
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
DP3APPKB pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 memang belum 100%. Hal ini disebabkan untuk mengukur IDG melalui 3 indikator yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Peran DP3APPKB terkait ketiga indikator tersebut terbatas pada advokai dan sosialisasi sehingga belum dapat mengakomodir keseluruhan. Sementara perolehan angka IDG berdasarkan perhitungan BPS. Meski capaian belum 100%, diketahui Anggaran Responsif Gender Pemerintah Kota



Surabaya 52,02% dari APBD Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah di Kota Surabaya telah anggaran yang diperuntukkan mendukung pemberdayaan perempuan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam penilaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender, telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu sumber daya manusia melalui perpanjangan tangan dalam penyusunan ARG ke seluruh perangkat daerah dengan membentuk tim *driver* dan *focal point*. Dengan demikian juga telah dilakukan efisiensi waktu dan anggaran.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Indeks Pemberdayaan Gender menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak. Program yang mendukung keberhasilan indikator Indeks Pemberdayaan Gender yaitu Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan tiga kegiatan yaitu 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tiga kegiatan yaitu 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dan 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023 memiliki nilai 83,20 dari target 83,46. Target belum tercapai sehingga diperlukan rencana tindak lanjut sehingga pada tahun 2024 target dapat tercapai 100%. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu

optimalisasi peran *Tim Driver* dan *Focal Point* melalui koordinasi intens dengan tenaga ahli sehingga mendapat pendampingan dan kinerja lebih maksimal.

#### III.2.4. Sasaran Strategis 4 : Mewujudkan keluarga yang berkualitas

Capaian indikator-indikator sasaran “Mewujudkan keluarga yang berkualitas” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Sasaran “Mewujudkan keluarga yang berkualitas” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56,29	62,69	111,37%

##### III.2.4.1 Penjelasan Sasaran 4 Indikator 1

- Penjelasan Singkat

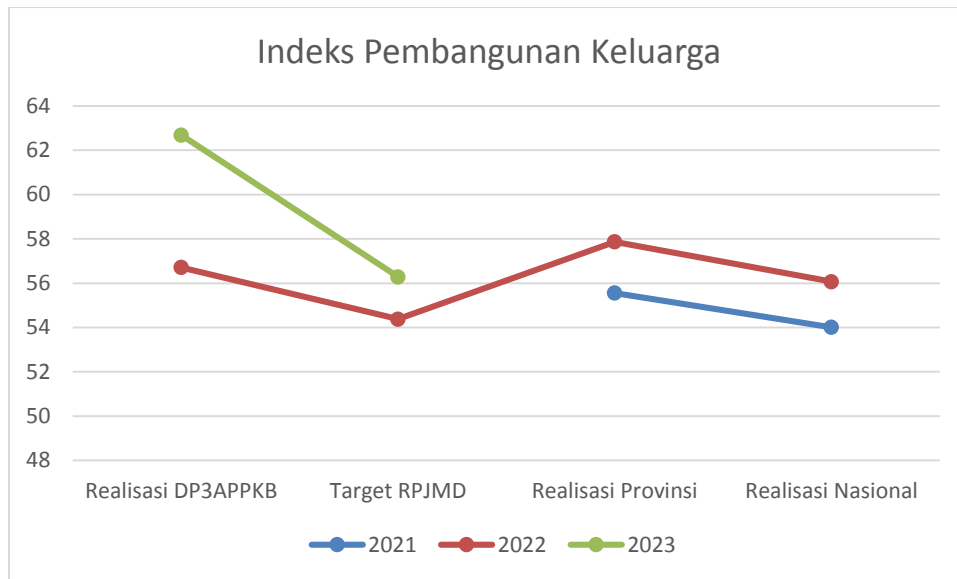
Indikator Indeks pembangunan keluarga (ibangga) adalah indeks pencapaian yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, kebahagiaan keluarga dalam upaya membangun kualitas keluarga. Formulasi perhitungan ibangga yaitu survey keluarga Nilai: <40 = rentan (kurang baik) 40-70 = berkembang (cukup baik) >70 = tangguh (baik).

- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target indikator Indeks pembangunan keluarga di tahun 2023 yaitu 56,29. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 62,69 sehingga capaian indikator tersebut 111,37%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2021 indikator Indeks pembangunan keluarga belum memiliki target. Target tahun 2022 yaitu 54,38 dan realisasi 56,71 dengan capaian 104,285%. Target tahun 2023 yaitu 56,29 dan realisasi 62,69 dengan capaian 111,37%.



Gambar 3. 4 Grafik Indikator Pembangunan Keluarga

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra  
Realisasi kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2023 yaitu 62,69. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 60,12. Jika di tahun 2024-2026 pencapaian kinerja stabil atau bahkan meningkat, maka di akhir tahun RPJMD Indeks Pembangunan Keluarga akan tercapai.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya  
Realisasi pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2023 sebesar 62,69, sedangkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi dan level nasional memiliki realisasi belum ada. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi DP3APPKB 56,71, realisasi Pemerintahan Provinsi Jawa timur 57,87, dan realisasi Nasional sebesar 56,07.
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
DP3APPKB pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2023 lebih dari 100%. Hal ini disebabkan telah dilakukan secara masif baik sosialisasi, advokasi, dan pendampingan pada keluarga di Kota Surabaya. Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memberikan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta keluarga yang memiliki anak usia balita sangat efektif untuk menyampaikan pola asuh yang baik dan benar. Adapun dukungan Dana selain APBD juga dana dari Pusat (DAK)

fisik dan non fisik yang menunjang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam penilaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga, telah dilakukan efisiensi sumber daya yaitu sumber daya manusia melalui perpanjangan tangan dalam pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Efisiensi sumber daya anggaran juga difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas saja.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Indeks Pembangunan Keluarga menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Program yang mendukung keberhasilan indikator Indeks Pembangunan Keluarga yaitu Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya

Indikator Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023 memiliki nilai 62,69 dari target 56,29. Meskipun target telah tercapai, D3APPKB memiliki rencana tindak lanjut untuk meningkatkan nilai ibangga melalui optimalisasi pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) karena pembangunan keluarga dapat tercapai jika orang tua sigap, tanggap, dan melaksanakan pola asuh yang tepat. Optimalisasi SOTH dilakukan dengan peningkatan koordinasi intens antar perangkat daerah sehingga dapat bersinergi dengan baik.

### III.2.5. Sasaran Strategis 5 : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk

Capaian indikator-indikator sasaran “Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Sasaran “Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita.	25	8,70	165,20%
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,76	1,70	103,41%

### III.2.5.1 Penjelasan Sasaran 5 Indikator 1

- Penjelasan Singkat

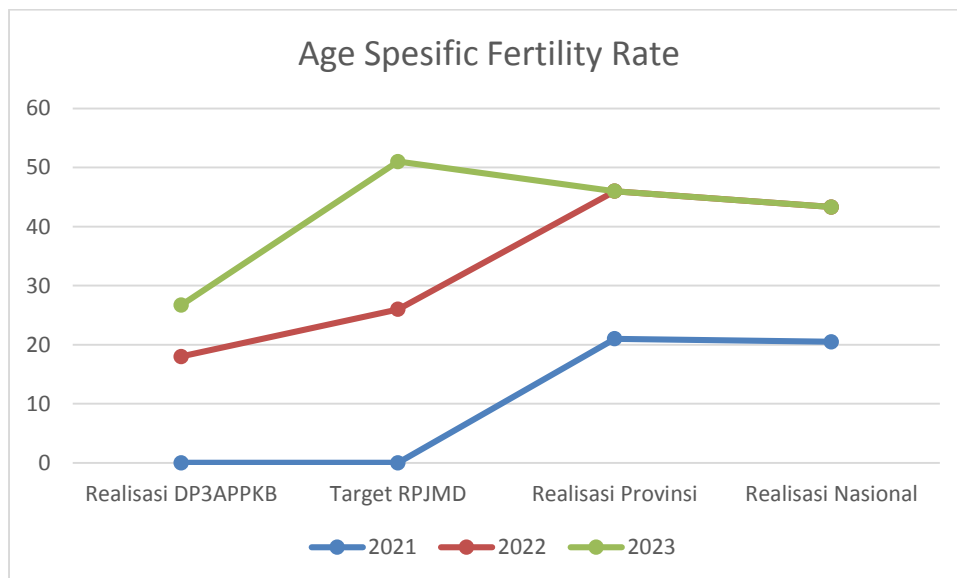
Indikator Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita adalah adalah angka rata-rata kelahiran per 1000 wanita menurut kelompok umur 15 - 19 tahun. Formulasi perhitungan ASFR yaitu Kelahiran per 1000 WUS kelompok umur 15 - 19 tahun (Catatan: Lower is better).

- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita di tahun 2023 yaitu 25. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 8,7 sehingga capaian indikator tersebut 165,20%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2021 indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita belum memiliki target. Target tahun 2022 yaitu 26 dan realisasi 18 dengan capaian 130,77%. Target tahun 2023 yaitu 25 dan realisasi 8,7 dengan capaian 165,20%. Perhitungan indikator tersebut lower is better atau semakin rendah angka capaiannya semakin baik.



Gambar 3. 5 Grafik Indikator Age Spesific Fertility Rate

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Realisasi kinerja pada indikator Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita tahun 2023 yaitu 8,7. Target kinerja

indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 24. Indikator dengan perhitungan lower is better atau semakin kecil nilai realisasi maka semakin besar capaian, maka di akhir tahun RPJMD Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita akan tercapai.

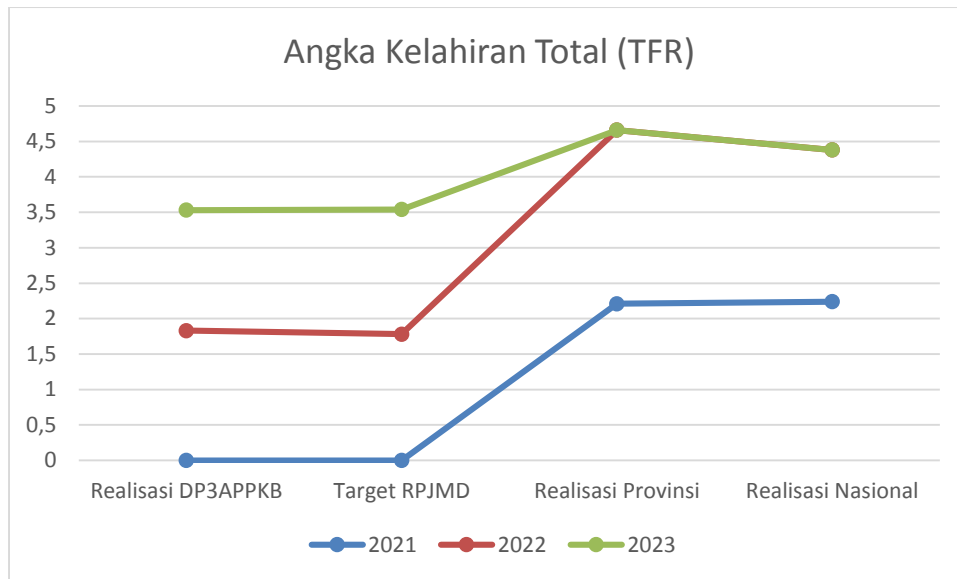
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya  
Realisasi pada indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita tahun 2023 sebesar 8,7, sedangkan realisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan level nasional memiliki belum ada. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi DP3APPKB 18, realisasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur 25 dan realisasi Nasional sebesar 22,08.
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
DP3APPKB pada indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita tahun 2023 lebih dari 100%. Hal ini disebabkan adanya sumber daya manusia cukup dan sesuai kualifikasi. Adapun dukungan Dana selain APBD juga dana dari Pusat (DAK) yang menunjang pelaksanaan kegiatan yang mendukung *Age Spesific Fertility Rate*.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Dalam penilaian Indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita, efisiensi sumber daya yang telah dilakukan berupa pemberian kendaraan roda dua untuk Penyuluh KB dan pelaksana lain terkait pelayanan KB sehingga biaya transportasi lebih efisien.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;  
Indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Program yang mendukung keberhasilan indikator indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran

Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya  
Indikator rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita Tahun 2023 memiliki nilai 8,7 dari target 25. Meskipun target telah tercapai, D3APPKB memiliki rencana tindak lanjut untuk mempertahankan capaian yang tinggi dengan meningkatkan koordinasi dengan Penyuluh KB yang mewakili setiap Kecamatan untuk melakukan kontrol terhadap upaya menekan angka kelahiran pada WUS usia 15-19 tahun melalui sosialisasi dan advokasi secara masif.

### III.2.5.1 Penjelasan Sasaran 5 Indikator 2

- Penjelasan Singkat  
Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) adalah jumlah rata-rata anak laki-laki / perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduksinya (usia 15 - 49 tahun) \* ASFR (Age Specific Fertility Rate) adalah angka rata-rata kelahiran per 1000 perempuan menurut umur ibu. Formulasi perhitungan TFR yaitu  $TFR = 5 \sum ASFR$  (Catatan: Lower is better)
- Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini  
Target indikator Angka Kelahiran Total (TFR) di tahun 2023 yaitu 1,76. Realisasi indikator tersebut di tahun 2023 sebesar 1,7 sehingga capaian indikator tersebut 103,41%.
- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir  
Pada tahun 2021 indikator Angka Kelahiran Total (TFR) belum memiliki target. Target tahun 2022 yaitu 1,78 dan realisasi 1,831 dengan capaian 97,13%. Target tahun 2023 yaitu 1,76 dan realisasi 1,7 dengan capaian 103,41%. Perhitungan indikator tersebut lower is better atau semakin rendah angka capaiannya semakin baik.



Gambar 3. 6 Grafik Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra  
Realisasi kinerja pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2023 yaitu 1,7. Target kinerja indikator tersebut sampai dengan akhir tahun RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yaitu 1,72. Jika di tahun 2024-2026 pencapaian kinerja stabil atau bahkan meningkat, maka di akhir tahun RPJMD Indeks Pembangunan Keluarga akan tercapai.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi pada organisasi lainnya  
Realisasi pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2023 sebesar 1,7, sedangkan realisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan level nasional memiliki belum ada. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi DP3APPKB 1,831, realisasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur 2,45 dan realisasi Nasional sebesar 2,14.
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  
DP3APPKB pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2023 lebih dari 100%. Hal ini disebabkan telah dilakukan berbagai upaya preventif jangka panjang untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya melalui sosialisasi dan advokasi pada Sekolah Siaga Kependudukan. Kolaborasi dan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga turut menyukseskan kegiatan yang diselenggarakan DP3APPKB.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



Dalam penilaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR), efisiensi sumber daya yang telah dilakukan berupa pemberian kendaraan roda dua untuk Penyuluh KB dan pelaksana lain terkait pelayanan KB sehingga biaya transportasi lebih efisien.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Angka Kelahiran Total (TFR) menjadi salah satu tugas yang diampu oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Program yang mendukung keberhasilan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dan 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2023 memiliki nilai 1,7 dari target 1,76. Meskipun target telah tercapai, D3APPKB memiliki rencana tindak lanjut untuk meningkatkan nilai TFR melalui koordinasi dengan tenaga ahli khususnya dari BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk menyelaraskan program kerja sehingga sasaran yang hendak dicapai dapat dicapai dengan cara lebih efektif.

### **III.3 CAPAIAN KINERJA LAIN**

#### **III.3.1. Manggala Karya Kencana**

Manggala Karya Kencana Tahun 2023 bagi Walikota Surabaya dan Ketua TP PKK Kota Surabaya. Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Bangsa Kencana serta dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.



Gambar 3. 7 Penghargaan Manggala Karya Kencana

### III.3.2. Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting

Kabupaten/ Kota terbaik ke 3 pada kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Timur



Gambar 3. 8 Penghargaan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting

### III.3.3. Diamond Award

Digitalisasi Satu Data pada Percepatan Penurunan Stunting melalui Aplikasi Sayang kategori Inovasi Percepatan Penurunan Stunting (Diamond Award)



Gambar 3. 9 Penghargaan Diamond Award

### III.3.4. Kelompok KB Pria

Kelompok KB Pria Tandes Mesra Kecamatan Tandes terbaik ke 3 tingkat Provinsi Jawa Timur



KERUTUGAN KEPALA  
PERWAKILAN BADAN KEPENDULUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : SKS 06 03/2023

TEMA  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELUARGA KB PRIA TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023

MERALA PERWAKILAN BADAN KEPENDULUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya meningkatkan kesetaraan ber KB di Jawa Timur serta dalam rangka memperingati Hari Keluarga Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan lomba lomba di lingkungan BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam melaksanakan lomba-lomba tersebut dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan, Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 melalui surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur nomor : 4767/NT.005/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kelompok KB Pria tahun 2023;
- Bahwa telah dilaksanakan Penilaian Profil Kelompok KB Pria dan Tim Dandia Lomba Kelompok KB Pria yang diakhiri dengan Berita Acara Penilaian Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2023 tanggal 28 April 2023;
- Bahwa telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke 3 (tiga) daerah pada awal bulan Mei 2023;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Sementara;
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur  
Jl. Arifin No. 21-23, Surabaya 60017  
T. (031)5022333, 5029088 F. (031)5017787, 5027790 E. [bkkbn@bkkbn.go.id](mailto:bkkbn@bkkbn.go.id)  
[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)  
jatin.bkkbn.go.id

Disusun di: Kota Surabaya  
Pada tanggal : 8 Mei 2023  
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur



Dr. MARIA DRUAWATI, MM

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur  
Jl. Arifin No. 21-23, Surabaya 60017  
T. (031)5022333, 5029088 P. (031)5017787, 5027790 E. [bkkbn@bkkbn.go.id](mailto:bkkbn@bkkbn.go.id)  
[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)  
jatin.bkkbn.go.id



- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Keluarga Berencana Nasional;
- Dejajaran Kinerja Kepala Pamanikan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Mengucapkan :

- Surat Keputusan Kepala BKKBN nomor : 223/KE.06/2023 tanggal 18 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2023;
- Surat Keputusan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur nomor 2631/KE.004/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2023;

MEMETARKAN

Dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menetapkan Pemenang Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2023 sebagaimana berikut:

- Juara 1 Kelompok KB Pria GATUTUKACA Kota Blitar
- Juara 2 Kelompok KB Pria KALURUNG Kab. Banyuwangi
- Juara 3 Kelompok KB Pria TANDES MESRA Kota Surabaya

KEDUA

Kepada Pemenang Lomba diberikan piagam penghargaan

KETIGA

Kepada Pemenang Juara 1 akan mewakili Provinsi Jawa Timur dalam Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Nasional Tahun 2023

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Disiapkan di: Kota Surabaya  
Pada tanggal : 8 Mei 2023  
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur



Dr. MARIA DRUAWATI, MM

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur  
Jl. Arifin No. 21-23, Surabaya 60017  
T. (031)5022333, 5029088 P. (031)5017787, 5027790 E. [bkkbn@bkkbn.go.id](mailto:bkkbn@bkkbn.go.id)  
[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)  
jatin.bkkbn.go.id

Gambar 3. 10 Penghargaan Kelompok KB Pria

### III.3.5. Praktek Mandiri Bidan

Praktek Mandiri Bidan dengan Capaian Hasil Layanan Terbanyak pada Pelayanan KB Serentak Hari Ibu Tahun 2023 atas nama PMB Yefi Marliandari Kecamatan Rungkut



Gambar 3. 11 Penghargaan Praktek Mandiri Bidan

### III.3.6. PUSPAGA Semangi Surabaya

PUSPAGA Semangi Kota Surabaya memenuhi standarisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peringkat PUSPAGA Utama yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Gambar 3. 12 Penghargaan PUSPAGA Semangi Kota Surabaya



### III.3.7. Kota Layak Anak

Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama Tahun 2023 pada evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 3. 13 Penghargaan Kota Layak Anak

### III.3.8. Anugerah Parahita Ekaraya

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor Tahun 2023 pada Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 3. 14 Anugerah Parahita Ekapraya

### III.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2023 adalah sebesar Rp. 50.530.174.140,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 45.391.638.340,-, atau sebesar 89,83% Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	14.163.837.534	13.404.567.036	94,64%
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.126.573.642	10.490.806.109	94,29%
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.624.284.246	2.555.114.028	97,36%
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.979.646	358.646.899	86,84%
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	1.391.649.735	1.089.699.140	78,30%
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	434.697.477	359.085.983	82,61%
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	335.219.278	293.888.157	87,67%
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	621.732.980	436.725.000	70,24%
<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	265.375.211	264.306.336	99,60%
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.375.211	264.306.336	99,60%
<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	2.850.624.461	2.462.484.137	86,38%
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	600.349.140	434.988.300	72,46%
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.250.275.321	2.027.495.837	90,10%
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	548.104.333	542.160.886	98,92%

Program - Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	166.000.000	162.000.000	97,59%
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	382.104.333	380.160.886	99,49%
<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>1.008.880.276</b>	<b>946.287.629</b>	<b>93,80%</b>
	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.008.880.276	946.287.629	93,80%
<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>1.058.683.811</b>	<b>1.006.343.829</b>	<b>95,06%</b>
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.683.811	1.006.343.829	95,06%
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>1.580.717.119</b>	<b>1.214.287.050</b>	<b>76,82%</b>
	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.580.717.119	1.214.287.050	76,82%
<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>593.347.000</b>	<b>587.137.000</b>	<b>98,95%</b>
	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	179.164.500	172.954.500	96,53%
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	414.182.500	414.182.500	100,00 %
<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>10.052.147.673</b>	<b>7.492.785.362</b>	<b>74,54%</b>
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	902.682.800	890.321.212	98,63%
	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	953.824.456	950.860.888	99,69%
	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	7.706.140.417	5.162.135.262	66,99%

Program - Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	489.500.000	489.468.000	99,99%
<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>17.016.806.987</b>	<b>16.381.579.935</b>	<b>96,27%</b>
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	17.016.806.987	16.381.579.935	96,27%
<b>TOTAL</b>		<b>50.530.174.140</b>	<b>45.391.638.340</b>	<b>89,83%</b>

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84,24	93,50	110,99%	14.163.837.534	13.404.567.036	94,64%
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	82,91	85,61	103,26%	2.615.668.420	2.494.792.344	95,38%
3	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender.	83,46	83,20	99,69%	6.088.366.526	5.030.776.663	82,63%
4	Mewujudkan keluarga yang berkualitas.	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56,29	62,69	111,37%	17.016.806.987	16.381.579.935	96,27%



No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita.	25	8,70	165,20%	593.347.000	587.137.000	98,95%
		Angka Kelahiran Total (TFR)	1,76	1,70	103,41%	10.052.147.673	7.492.785.362	74,54%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjabaran perencanaan kinerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang telah dijelaskan pada bab II, dan penjabaran capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada bab III, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait capaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari capaian indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan di perubahan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, diperoleh rata-rata nilai capaian 115,65%. Nilai capaian tertinggi terdapat pada indikator Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita dengan perolehan 165,20%. Dari anggaran yang terdapat pada ke-11 program, rata-rata penyerapan anggaran di masing-masing program adalah 89,83%. Penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada “Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak” dengan capaian 99,60%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada “Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)” dengan capaian 74,54%.

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dan meningkatkan kapasitas SDM dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata perubahannya.

## LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI MM  
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI  
Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERI CAHYADI

Dra. IDA WIDAYATI MM  
NIP 196809081996022002

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84.24
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	82,91%
3	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Indeks Pemberdayaan Gender.	83,46%
4	Mewujudkan keluarga yang berkualitas.	Indeks pembangunan keluarga (ibangga) .	56,29%
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita. Angka Kelahiran Total (TFR)	25 1,76%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.	Rp 14.163.837.534
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.	Rp 1.008.880.276
3	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.	Rp 1.391.649.735
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks).	Rp 17.016.806.987
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.	Rp 265.375.211
6	Program Pengendalian Penduduk.	Rp 593.347.000
7	Program Perlindungan Perempuan.	Rp 548.104.333
8	Program Pemenuhan Hak Anak (pha).	Rp 2.850.624.461
9	Program Perlindungan Khusus Anak.	Rp 1.058.683.811
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb).	Rp 10.052.147.673
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp 1.580.717.119
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 50.530.174.140</b>

Surabaya, 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA,



ERI CAHYADI



Dra. IDA WIDAYATI MM  
NIP 196809081996022002